

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KECAMATAN BANJARMASIN
SELATAN DALAM PILKADA 2020 DI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Herman Crystian Marbun

NPP. 29.1171

Asdaf Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: hermanmarbun69@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP) : The amount of political participation of the community in the 2020 Regional Elections in South Banjarmasin District, Banjarmasin City, which can be said to be not optimal, because out of a total of 108,325 people who entered the voter list, as many as 44,215 people did not exercise their voting rights. **Purpose:** This study aims to describe and analyze the low political participation of the community and also the factors that affect the level of political participation of the community in the 2020 Regional Elections in South Banjarmasin District, Banjarmasin City. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative, while the data collection techniques are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results/Findings:** Based on the results of research and analysis that has been carried out by the author, there are several factors that affect people's political participation in the 2020 Regional Elections in South Banjarmasin District, Banjarmasin City, namely 1) Pandemic factors, where people are still afraid of the pandemic that is in the community, 2) Economic factors, jobs that force people not to be present in the implementation of Pilakada, 3) socialization factors where there is still a lack of innovation in socialization and 4) Weather Factors, where more or less rainy weather on election day makes many residents who do not come **Conclusion:** : Of the 5 sub-districts in Banjarmasin City, South Banjarmasin District has the second lowest level of political participation out of the 5 existing sub-districts but with the highest level of DPT in Banjarmasin City. Based on data obtained from the Banjarmasin City KPU, the level of political participation of the community in South Banjarmasin District in the 2020 Regional Elections only reached 66% of the Banjarmasin City KPU target of 78%. Not only participation during the voting process, but also during the socialization process. This was conveyed by the KPU of Banjarmasin City to the author at the time of the interview, it has occurred since the beginning of the General Election period in Banjarmasin City and continues until now. South Banjarmasin Subdistrict has always been the lowest order in the level of political participation in Banjarmasin City.

Kata Kunci : Political Participation and Regional Head Elections

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Jumlah partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2020 di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang dapat dikatakan belum optimal, karena dari total 108.325 orang yang masuk ke dalam daftar pemilih, sebanyak 44.215 orang tidak menggunakan hak pilihnya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis rendahnya partisipasi politik masyarakat dan juga faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2020 di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2020 di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yaitu 1) Faktor pandemi, dimana masyarakat masih merasa takut dengan adanya pandemi yang sedang berada di masyarakat, 2) Faktor ekonomi, pekerjaan yang memaksa masyarakat tidak hadir dalam pelaksanaan Pilkada, 3) faktor sosialisasi dimana masih kurangnya inovasi dalam sosialisasi dan 4) Faktor Cuaca, dimana sedikit banyaknya cuaca hujan pada saat hari pemilihan membuat banyak warga yang tidak datang. **Kesimpulan:** Dari jumlah 5 Kecamatan di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki tingkat partisipasi politik paling rendah kedua dari 5 kecamatan yang ada namun dengan tingkat jumlah DPT paling tinggi di Kota Banjarmasin. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kota Banjarmasin, tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam Pilkada 2020 hanya mencapai 66% dari target KPU Kota Banjarmasin yaitu 78%. Tidak hanya partisipasi pada saat proses pemberian suara, namun juga pada saat proses sosialisasi. Hal tersebut disampaikan oleh KPU Kota Banjarmasin kepada penulis pada saat wawancara, telah terjadi sejak awal masa Pemilihan Umum di Kota Banjarmasin dan terus berlanjut sampai saat ini. Kecamatan Banjarmasin Selatan selalu menjadi urutan terendah dalam tingkat partisipasi politik di Kota Banjarmasin.

Kata Kunci : Partisipasi Politik dan Pemilihan Kepala Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005. Dan pada proses dalam penyelenggaraan Pilkada pun mengalami beberapa modifikasi yang bertujuan untuk mengikuti sesuai dengan perubahan Undang-Undang yang mendasarinya dan dinamika dari perkembangan politik itu sendiri. Dimana dengan adanya perubahan Undang-Undang diharapkan dapat membawa perubahan bagi bangsa Indonesia dalam hal pengagendaaan reformasi secara demokrasi. Juga itu menjadi salah satu nilai demokrasi yang kuat dalam kehidupan berpolitik bagi masyarakat di Indonesia dimana Masyarakat daerah bisa dengan bebas menyatakan aspirasi politiknya lewat Pilkada. Dalam suatu kehidupan bernegara dan bermasyarakat dibutuhkan suatu bentuk partisipasi masyarakat dalam wujud tanda keikutsertaan masyarakat dalam mengawal suatu perjalanan politik. Sama halnya dalam suatu pilkada dibutuhkan partisipasi politik masyarakat sebagai suatu tanda keikutsertaan masyarakat daerah dalam membangun daerah itu sendiri. Karena dengan partisipasi politik yang tinggi berarti masyarakat memiliki kesadaran dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi atau kebutuhan masyarakat daerah dan masyarakat masih memiliki kepercayaan kepada pemerintah yang terpilih itu bisa membangun daerah tersebut. Dimana suksesnya suatu pelaksanaan proses dalam perpolitikan seperti pilkada setidaknya bisa menjadi tolak ukur dalam cara masyarakat untuk menyikapi dan komitmen dalam hal bernegara khususnya partisipasi politik.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dilihat tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pilkada 2020 di daerah Banjarmasin Selatan dengan jumlah DPT sekitar 108.325 tetapi pada pelaksanaan Pilkada jumlah pemilih yang menggunakan hak suara hanya sekitar 64.110 suara dimana tingkat persentasinya hanya sekitar 59%. Tentu ini menjadi hal yang sangat disayangkan karena di saat pesta demokrasi ini dimana kita bisa menyalurkan

aspirasi kita dengan cara memilih pasangan yang bisa mempunyai aspirasi atau kebutuhan masyarakat daerah, namun kejadian di lapangan masih banyak masyarakat yang belum mau berpartisipasi dalam pilkada ini. Ini menjadi tantangan tersendiri dimana jika dilihat dari angka partisipasi politik dalam pemilihan walikota sebelumnya pada tahun 2015. Tingkat partisipasi politik ini mengalami kemunduran dimana pada pemilihan walikota 2015 lalu Kecamatan Banjarmasin Selatan dari 106.169 DPT yang telah ditetapkan terdapat 70.466 masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Dimana tingkat partisipasi politik masyarakat kecamatan Banjarmasin selatan saat itu mencapai 66%. Dimana jika dilihat terdapat pengurangan sebesar 7% persen dalam tingkat partisipasi politik masyarakat kecamatan Banjarmasin Selatan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya merupakan karya tulis ilmiah yang sudah dikaji dan diteliti oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan acuan dan referensi serta bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian pertama oleh Jurnal Oleh L.M Azhar Sa'ban, Anwar Sadat, dan Nastia (2018) dengan judul "PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2018" dan hasil penelitian *Tingkat Partisipasi politik masyarakat Bau Bau pada pilkada 2018 terbilang tinggi, faktor yang mempengaruhi adalah: rangsangan politik dari media massa, faktor karakteristik pribadi, keadaan politik kota Bau Bau tidak mengalami tekanan sehingga masyarakat merasa bebas dalam memilih. Peran KPUD yang gencar dalam mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga partisipasi politik masyarakat yang tinggi. Penelitian kedua oleh Petrus Ly dengan judul "PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA DULOLONG DALAM PEMILIHAN CALON BUPATI PADA PILKADA KABUPATEN ALOR TAHUN 2018" dan hasil penelitian *Tingkat Partisipasi Masyarakat sangat baik dimana seluruh masyarakat menggunakan hak pilih. Faktor dominan bagi masyarakat dalam memilih adalah: faktor sosok calon, faktor visi misi yang dijanjikan calon, kesadaran politik, jumlah TPS, faktor sosiologis. Penelitian ketiga oleh Faiz Albar Nasution & kushandajani dengan judul "PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KECAMATAN MEDAN MAIMUN PADA PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018" dan hasil Tingkat partisipasi politik masyarakat masih rendah dikarenakan beberapa faktor: kesadaran politik masyarakat yang kurang, rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, status social dan status ekonomi menengah ke atas dan kebawah tidak menggunakan hak pilih. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ikut Pilkada: afiliasi politik orang tua, pengalaman organisasi dan pemahaman politik.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini membahas tentang Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada 2020 pada tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan.

1.5 Tujuan

Bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2020, Faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik pada Pilkada 2020 di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara Reduksi Data (reduksi data), Display Data (penyajian data) dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (menarik kesimpulan) dengan informan sebanyak 9 orang orang diantaranya Ketua KPU Kota Banjarmasin, Camat Banjarmasin Selatan, Ketua

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banjarmasin Selatan, Perwakilan tokoh agama, tokoh adat, dan Pengusaha, dan masyarakat pemilih sebanyak 3 orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Partisipasi politik Masyarakat pada pemilihan Walikota Banjarmasin 2020 di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

Analisis yang dilakukan oleh penulis menggunakan perspektif teoritis dan dikaitkan dengan perspektif legalistik dengan mengamati perbandingan dari kenyataan yang berlangsung di lapangan dengan teori yang digunakan. Teori yang penulis gunakan hanya berfokus pada pengamatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Anyaman Purun Oleh Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.Berdasarkan pembahasan mengenai pemberdayaan UKM Kerajinan anyaman purun penulis membahas mengenai pendekatan pemberdayaan melalui 4 dimensi yang dikemukakan oleh Mardikanto (2010: 75-86) dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja.

3.1.1 Kegiatan Pemilihan

Selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 36 ayat (5), Pemilihan Umum merupakan salah satu kegiatan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan Kecamatan yang berperan serta dalam kegiatan tersebut, masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan dapat mewujudkannya sebagai indikator sosial politik, terlebih dalam hal partisipasi politik. tingkat partisipasi Masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Selatan masih sangat rendah,

3.1.2 Lobby

Langkah-langkah dalam menjalankan Lobby yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat ataupun masyarakat kepada pemerintah yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan pemilihan pada Pilkada 2020 dengan menghubungi pejabat partai politik di Kota Banjarmasin belum terlihat secara nyata. Hal tersebut terjadi karena pola pikir masyarakat yang belum ada sampai ke arah tersebut .

3.1.3 Kegiatan Organisasi

Kegiatan Organisasi selama menjelang pelaksanaan pilkada 2020 di kota banjarmasin sangat gencar dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin Sosialisasi Pemilihan yang digencarkan oleh KPU Kota Banjarmasin bukan hanya pada saat kegiatan pencoblosan, tetapi juga pada tahapan lainnya. Seperti yang dimuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum(PKPU) Nomor 5 Tahun 2015 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati dan/atau walikota dan wakil walikota pasal 1 ayat ke 10 bahwa sosialisasi penyelenggaraan pemilihan yang selanjutnya disebut sosialisasi pemilihan, adalah proses penyampaian informasin tentang tahapan dalam proses penyelenggaraan pemilihan dan juga sosialisai kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan yang berlaku sehingga kedua unsur sosialisasi telah dilakukan dimana sosialisasi mengenai pemilihan telah dilakukan dan juga sosialisasi mengenai pemilhan di masa pandemi Covid-19 juga telah dilaksanakan. Kegiatan Sosialisasi sendiri di Kecamatan Banjarmasin Selatan sudah sangat maksimal

3.1.4 Contracting

Didapatkan usaha individu dalam mempengaruhi hasil pemilihan yang dikemukakan oleh oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Individu-individu yang menajdi oknum tentu memiliki kepentingan politik baik pribadi maupun golongan akan menggunakan berbagai cara baik yang resmi maupun tidak resmi dalam mempengaruhi hasil akhir rekapitulasi suara dalam Pilkada Walikota 2020 namun itu tidak berdampakk banyak pada kegiatan maupun hasil akhir dari Pilkada 2020 di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

3.1.5 Tindakan Kekerasan (*violence*)

Pilkada 2020 di Kecamatan Banjarmasin Selatan hampir tidak adanya Tindakan kekerasan yang merugikan fisik, harta maupun benda walaupun ada sedikit insiden namun itu tetap bisa diatasi oleh Panitia pemilihan yang bertugas di TPS masing-masing sehingga bisa disimpulkan Pilkada 2020 di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berjalan kondusif walaupun di tengah pandemi Covid-19 yang tengah merebak di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

3.2 Hambatan yang di alami Pemilih dalam Pemilihan Walikota Banjarmasin tahun 2020 di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

3.2.1 Faktor Pandemi

Pandemi Covid-19 tentu saja menjadi penghalang utama yang menyebabkan terhambatnya masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pilkada 2020 di kota Banjarmasin khususnya di kota Banjarmasin, dimana kurangnya pengetahuan masyarakat akan suasana TPS yang sudah dirancang khusus sesuai dengan protokol covid-19 dan itu berdampak kepada pemikiran masyarakat sehingga masyarakat merasa bahwa dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan menyebabkan mereka dapat terdampak covid-19. Langkah yang dilakukan KPU untuk mensosialisasikan TPS sesuai protokol menurut penulis sudah dilakukan dengan maksimal dengan menyebarkan di berbagai media massa baik cetak maupun media elektronik.

3.2.2 Faktor Ekonomi

Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan Kecamatan yang memiliki kondisi ekonomi dibawah rata-rata kecamatan lainnya. Dengan hal tersebut tentu memberikan pengaruh juga dalam tingkat partisipasi politik masyarakat karena pola pikir masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan yang merasa untuk tidak datang jika tidak menghasilkan hasil yang pasti, dalam hal ini berbentuk uang. Pola pikir masyarakat ini tentu sangat berpengaruh Pilkada 2020 di Kota Banjarmasin menjadikan pilihan masyarakat yang lebih mengutamakan untuk bekerja karena menentukan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Padahal, hak suara yang tidak mereka gunakan memberikan pengaruh besar pada hasil akhir pelaksanaan Pilkada 2020 di Kota Banjarmasin.

3.2.3 Faktor Sosialisasi

Kehadiran Pilkada di tengah masa pandemi Covid-19 dan di ketatnya protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah merupakan kali pertama terjadi di Kota Banjarmasin. Pentingnya memaksimalkan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar informasi yang diberikan merata dan juga dapat dipahami dengan baik dan benar tentang tata cara pemilihan yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah KPU Kota Banjarmasin dan pemerintah Kecamatan Banjarmasin Selatan yang bertugas dan berwenang masih sangat kurang melakukan inovasi dalam kegiatan sosialisasi di masa pandemi Covid-19, padahal masyarakat sudah beranggapan bahwa sosialisasi sangat menjenuhkan dan selalu monoton pada setiap kegiatan pemilihan apalagi di masa pandemi Covid-19 ini. Antusiasme masyarakat yang rendah dalam kegiatan sosialisasi berdampak pada hasil akhir dalam Pilkada 2020 di kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin adalah karena kurangnya informasi yang mereka dapati, dan pola pikir masyarakat yang semakin tidak peduli pada kegiatan pemilihan tersebut.

3.2.3.1 Faktor Cuaca

Sedikit banyaknya faktor cuaca mempengaruhi dalam kegiatan pemilihan dimana menurut narasumber pada hari pelaksanaan pemungutan suara terjadi hujan yang cukup besar dan itu menyebabkan masyarakat semakin merasa berat untuk menuju tempat pemungutan suara

sehingga itu mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian tentang partisipasi politik masyarakat dalam pilkada di daerah ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian sebelumnya dimana yang diteliti disini adalah bagaimana tingkat partisipasi politik di daerah saat melakukan pilkada dan bagaimana bentuk partisipasi masyarakat daerah pada saat Pilkada. Namun yang menjadi perbedaan disini adalah penulis menganalisis partisipasi politik masyarakat di daerah menggunakan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Samuel P Huntington dan Joan M Nelson. Hasil dari ketiga penelitian sebelumnya juga berbeda-beda dengan faktor yang berbeda-beda juga. Hal ini dikarenakan lokus dari tiap penelitian yang berbeda sehingga tingkat partisipasi masyarakat juga berbeda Dan yang menjadi perbedaan dengan penelitian di sebelumnya adalah dalam hal pelaksanaan Pilkada dimana pelaksanaan pilkada pada saat 2020 sudah berada di fase new normal dengan pandemi covid -19 yang mana pada penelitian sebelumnya pilkada dilaksanakan dengan normal.

IV. KESIMPULAN

Dari jumlah 5 Kecamatan di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki tingkat partisipasi politik paling rendah kedua dari 5 kecamatan yang ada namun dengan tingkat jumlah DPT paling tinggi di Kota Banjarmasin. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kota Banjarmasin, tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam Pilkada 2020 hanya mencapai 66% dari target KPU Kota Banjarmasin yaitu 78%. Tidak hanya partisipasi pada saat proses pemberian suara, namun juga pada saat proses sosialisasi. Hal tersebut disampaikan oleh KPU Kota Banjarmasin kepada penulis pada saat wawancara, telah terjadi sejak awal masa Pemilihan Umum di Kota Banjarmasin dan terus berlanjut sampai saat ini. Kecamatan Banjarmasin Selatan selalu menjadi urutan terendah dalam tingkat partisipasi politik di Kota Banjarmasin.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada KPU Kota Banjarmasin agar dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada yang akan diselenggarakan pada periode berikutnya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ketua KPU Kota Banjarmasin beserta jajaran, Camat Banjarmasin Selatan, beserta jajaran pegawai dan masyarakat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota

Joan Nelson & Samuel P. Huntington (1994) "Partisipasi Politik di Negara. Berkembang". Jakarta : Rineka Cipta

Sa'ban L.M.,Sadat,A .,& Nastia (2018)(Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton) “PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2018”

Ly Petrus (2018)(Dosen pada prodi Pendidikan kewarganegaraan FKIP Undana “ PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA DULOLONG DALAM PEMILIHAN CALON BUPATI PADA PILKADA KABUPATEN ALOR TAHUN 2018”

Nasution,F,A & kushandajani (2018)(Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro) “ PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KECAMATAN MEDAN MAIMUN PADA PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018”

